

# PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK NASIONAL



Wahyudi Kumorotomo

[www.kumoro.staff.ugm.ac.id](http://www.kumoro.staff.ugm.ac.id)  
[kumoro@map.ugm.ac.id](mailto:kumoro@map.ugm.ac.id)

# MODEL KEBIJAKAN

## (Allison, 1981)

---

1. Rational actor;  
Sosok pemerintah sebagai kotak-hitam, spt aktor individual
2. Organisational process;  
Kebijakan sebagai output organisasi, dg struktur, sistem koordinasi, kerjasama antar-satuan, SOP. Ekspektasi thd kebijakan: inkremental
3. Bureaucratic politics;  
Kebijakan pemerintah adl produk politik, tawar-menawar, tergantung persepsi dan posisi para pelaku. "Where you stand depends on where you sit".

# INSTRUMEN KEBIJAKAN

---

1. **Peraturan perundangan;**  
Kewenangan membuat peraturan perundangan adalah sumberdaya unik bagi pemerintah
2. **Layanan umum (*public services*);**  
Pemerintah = organisasi penyelenggara layanan umum paling besar. Catatan: terkadang swasta & Ornop lebih efektif, efisien
3. **Dana;**  
Ideal: 45% untuk kesra. Di Indonesia: 69% untuk aparat.
4. **Pajak;**  
"The government giveth and the government taketh away". Pembebasan pajak (tax holiday) & pajak progresif sebagai instrumen distribusi.
5. **Imbauan (*suasion*);**  
Atas nama kepentingan umum, pemerintah punya posisi lebih baik untuk menyampaikan imbauan.

# TATA-URUTAN PERUNDANGAN

---

1. UUD 1945
2. Ketetapan MPR
3. Undang-undang
4. Perpu
5. Peraturan Pemerintah
6. Keputusan Presiden
7. Peraturan Daerah.

## Catatan:

1. Semua pihak harus dilindungi haknya
2. Efektivitas perundangan berlain-lainan. Kelengkapan perundangan tidak menjamin kualitas kebijakan yg baik
3. Pelaksanaan peraturan jauh lebih penting daripada ratifikasinya.

# TANTANGAN KEBIJAKAN PUBLIK DI INDONESIA

---

- 1. Mewujudkan negara kesejahteraan (*welfare state*)**
- 2. Pemberantasan korupsi**
- 3. Partisipasi**
- 4. Desentralisasi**
- 5. Keberagaman**
- 6. Posisi politik internasional**

# *WELFARE STATE*

## UNTUK INDONESIA ?

---

- ✍ Welfare State: Sistem yang memberi peran lebih besar kepada negara (pemerintah) untuk mengalokasikan dana publik demi menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warganya (Spicker, 1988)

### **Fakta di Indonesia:**

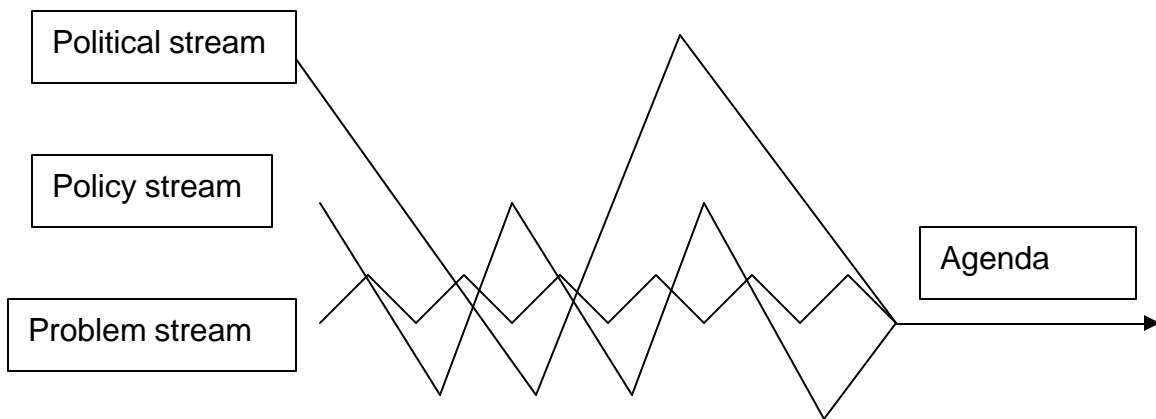
- ✍ 97,5% aset nasional ternyata dimiliki oleh 2,5% konglomerat (BPS, 1997)
- ✍ SBY menargetkan pajak sebesar 19% dari PDB tetapi belanja kesejahteraan sosial hanya 4% dari PDB

## PROSES KEBIJAKAN (Jones, 1984)

<b>Kegiatan</b>	<b>Kategori</b>	<b>Produk</b>
Persepsi Agregasi Organisasi Representasi Penyusunan agenda	Masukan masalah ke pemerintah	Masalah Tuntutan (demand) Akses Prioritas
Formulasi Legitimasi Penganggaran	Tindakan dari pemerintah	Proposal Program Anggaran
Implementasi	Tanggapan teknis pemerintah thd masalah	Layanan Pembayaran Kemudahan Pengawasan
Evaluasi Penyesuaian "Terminasi"	Masukan program ke pemerintah	Justifikasi Rekomendasi Perubahan Solusi

# MODEL PERUMUSAN AGENDA

---





# SIAPA YANG TERLIBAT DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN?

---

- ✍ Di dalam pemerintahan: eksekutif, birokrat, politisi.

Catatan: ada banyak pihak yang bekerja untuk aktor di pemerintahan: staf ahli, akademisi, kelompok profesional, staf khusus DPR, lembaga penelitian, konsultan, dsb

- ✍ Di luar pemerintahan: kepentingan pribadi, pengusaha, kelompok kepentingan, kelompok penekan.

Masing-masing kelompok ini kemungkinan juga memiliki staf ahli, akademisi, konsultan, atau staf khusus.

# KEMAMPUAN YANG DITUNTUT BAGI PERUMUS KEBIJAKAN

---

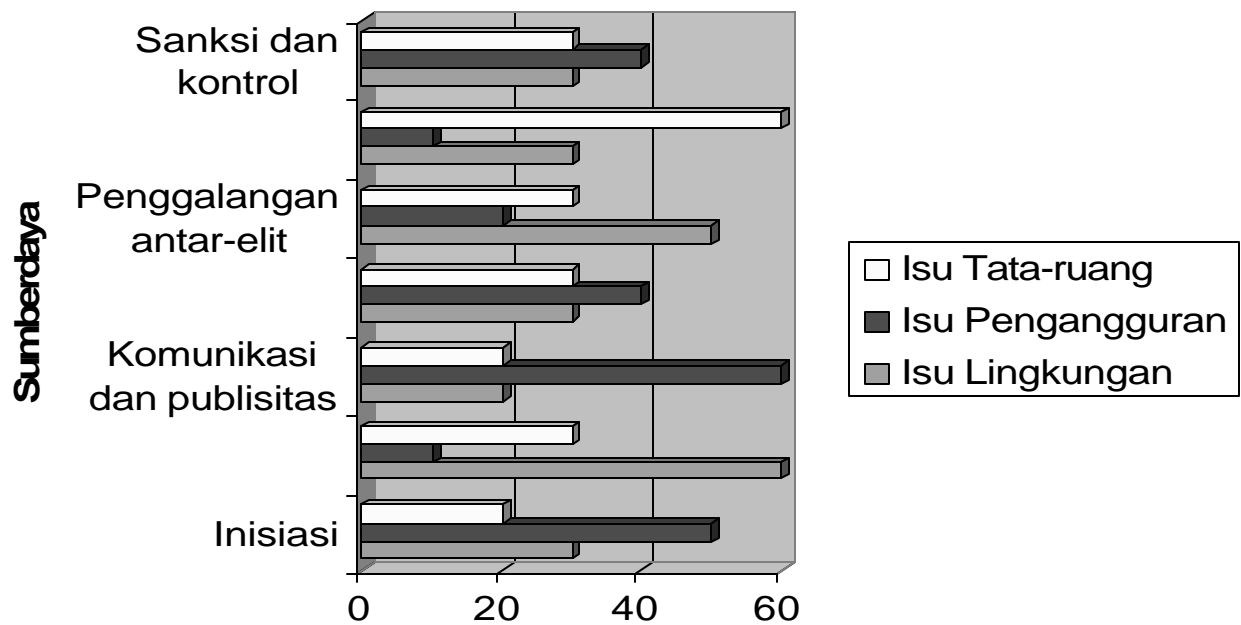
- ✍ Melihat kaitan kebijakan dengan isu eksternal. Mis: isu energi dengan lingkungan
- ✍ Melihat kaitan dengan isu internal. Mis: isu bencana banjir dengan perencanaan kota, konservasi lingkungan
- ✍ Mengetahui apa yang harus dilakukan; analisis data, pengalaman, intuisi
- ✍ Mengetahui dampak positif maupun negatif; projektif maupun reaktif.

# SUMBERDAYA PERUMUS KEBIJAKAN

---

1. Inisiasi
2. Staff dan perencanaan
3. Komunikasi dan publisitas
4. Dukungan lembaga
5. Penggalangan antar-elit
6. Pendanaan
7. Sanksi dan kontrol

## Identifikasi Kekuatan Pengaruh (Leverage Points) (Bauer & Gergen, 1968:185)





# LEGITIMIZING POLICIES

## (Mengabsahkan Kebijakan)

---

Mengapa tidak semua rumusan kebijakan secara otomatis dapat terlaksana?

Persoalan legitimasi:

1. Tidak semua perumus kebijakan paham tentang proses kebijakan, peka terhadap masalah publik, dan piawai dalam menyepadankan instrumen dan tujuan
2. Pertentangan antar *stake-holders* tentang cara memecahkan masalah publik
3. Banyak kepentingan yang belum terakomodasi
4. Komunikasi dari para perumus kebijakan kurang efektif dan kurang berhasil meyakinkan publik

# KOMPOSISI DPR 2004-2009

---

No.	Partai	Jumlah
1	Golkar	128
2	PDIP	109
3	PPP	58
4	Demokrat	55
5	PAN	53
6	PKB	52
7	PKS	45
8	PBB	11
9	Lainnya	39
	Total	550

# KOMPOSISI FRAKSI DEWAN KOTA JOGJA

---

No	Nama	Jml
1	PDIP	11
2	PAN	9
3	Golkar	5
4	Demokrat dan Persatuan	5
5	Keadilan Sejahtera	5



# PENGANGGARAN (BUDGETING)

---

Wildavsky (*The Politics of the Budgetary Process, 1979*):

- ✍ "the budget lies at the heart of the political process".
- ✍ "Anggaran adalah serangkaian tujuan dengan daftar harga terlampir".

Rubin (*The Politics of Public Budgeting, 2000*):

- ✍ Budgets reflect choices
- ✍ Budgets reflect priorities
- ✍ Budgets reflect relative proportions of decisions made for local and constituency purposes.

# BENTUK-BENTUK IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

---

- ✍ Pelayanan; pendidikan, kesehatan, kependudukan
- ✍ Pembayaran; subsidi, BLT
- ✍ Kemudahan (access); infrastruktur, listrik, telepon
- ✍ Pengawasan; IMB, UU anti-monopoli.

Tiga pilar implementasi (Jones, 1991):

1. Organisasi
2. Interpretasi
3. Pelaksanaan, prosedur / ketentuan rutin

# Konteks

## Tata-Pemerintahan dan Kebijakan Publik

---

	<b>Otoritas / Kewenangan</b>	<b>Transaksi</b>	<b>Persuasi</b>
Aktivitas pokok pemerintahan	Pembebanan ( <i>Imposing</i> ) Pengaturan Penyediaan barang & jasa	Penciptaan kerangka-kerja  Penilaian hasil	Mengundang partisipasi  Menunjukkan arah kebijakan
Perspektif yang tepat bagi implementasi	Penegakan ( <i>enforcement</i> )	Kinerja	Hasil bersama ( <i>co-production</i> )
Jalur manajemen publik	<i>Input</i>	<i>Output</i>	<i>Outcome</i> sebagai hasil kerjasama